
ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023

Tris Dianto^{1*}, Adhy Firdaus², Devid Putra Arda³

¹STIE GANESHA

Email: ¹trisdianto78@gmail.com

*) Corresponding Author

Abstract

Received: 07 November 2024

Revised: 20 November 2024

Accepted: 17 December 2024

Published online:

Analisis Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan data sekunder dan primer seperti dokumen, observasi, wawancara mendalam, FGD, kajian dan eksprimen, dengan informan yang terlibat langsung dalam perencanaan sebanyak 3 orang yang bekerja di kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Barat. Hasil Penelitian adalah responden cukup memahami dengan baik tentang istilah perencanaan, definisi pembangunan, dan hubungan antara pembangunan dan perencanaan di Kalimantan Barat yang sangat erat dan saling terkait. Namun tidak mengetahui tentang IPPN Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 yang mendapatkan nilai keselarasan 73,81 (cukup baik) sehingga terlihat rendahnya kualitas dokumen perencanaan dan aspek sinergi, Terjadinya inkonsistensi antara dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD oleh pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dapat disebabkan perbedaan prioritas dan kebijakan, keterbatasan kapasitas dan sumber daya, koordinasi yang kurang efektif, perubahan kebijakan dan kondisi dinamika politik dan perbedaan metodologi dan alat perencanaan. Belum ditindaklanjutnya proses perencanaan masuk dalam indeks kinerja utama lembaga sehingga berpengaruh pada tunjangan kinerja perencana tahun 2023 Provinsi Kalimantan Barat.

Keywords:

Perencanaan, Pembangunan, Sumber Daya Manusia, Pemerintah

INTRODUCTION

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pasti membutuhkan perencanaan yang akurat dan sehingga perlu melaksanakan evaluasi dari proses perencanaan pembangunan yang ada. Penyusunan dokumen perencanaan daerah untuk menentukan kebijakan dimasa depan dengan urutan pilihan, yang bekerja sama dengan berbagai unsur pemangku kepentingan untuk memanfaatkan dan pengalokasian sumber daya tersebut di tingkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Adanya pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) tahun 2023 yang digunakan untuk mengukur mutu perencanaan dimana nilai IPPN Kalimantan Barat sejumlah 73,81 dengan predikat Cukup Baik. Adanya perencanaan yang rendah oleh kalangan perencana, yang dapat mengakibatkan inkosistensi, ketidak selarasan dan ketidak sinkronnya perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan oleh Pemda Kalimantan Barat. Terdapat inkosistensi, ketidak selarasan dan ketidak sinkronnya perencanaan pembangunan tahun 2023 dengan indeks kinerja utama di Provinsi Kalimantan Barat.

Tinjauan pustaka pada penelitian ini diawali dengan pembahasan tentang landasan teori yang mencakup beberapa aspek penting terkait pengertian perencanaan.

Hubungan Perencanaan dan Pembangunan



Melakukan perencanaan dan pembangunan. Pendekatan perencanaan pembangunan, konsep dasar perencanaan pembangunan, perbedaan antara perencanaan, perencana, dan rencana, inkosistensi dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan), alasan-alasan pentingnya perencanaan pembangunan, langkah-langkah perencanaan Pemprov Kalimantan Barat sesuai kewenangannya, ringkasan analisis perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023.

Perencanaan pembangunan yang sering dibicarakan dimasyarakat seperti Waterston (Wibowo, 2008) yaitu Perencanaan adalah usaha sadar, terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut UU 25/2004 menyebutkan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan merupakan bagian fungsi manajemen yang dialokasikan pada pembangunan dan berperan sebagai petunjuk proses pembangunan yang berjalan dalam mencapai goal dan juga tolok ukur keberhasilan proses pembangunan. Pengertian pembangunan yaitu proses perubahan untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, sesuai dengan norma yang berlaku dan terjadi terus menerus. Saat akan melakukan pembangunan, maka pasti adanya sesuatu hal berbeda dan berubah, apabila tidak terlaksana perubahan sama sekali berarti belum bisa dinamakan dengan pembangunan.

Sangatlah kompleks dalam hubungan antara perencanaan dan pembangunan, karena bisa terlihat dari teori-teori perencanaan seperti incremental, advokasi, radikal, teori perencanaan rasional komprehensif, dan transaktif. Adanya kompleksitas pembangunan yang terlihat dari konsep pembangunan, pergeseran paradigma pembangunan mulai dari paradigma modernisasi, perluasan makna dan dependensi, kebutuhan dasar, pembebasan, endogen dan ekologi. Dalam UU 25/2004 tentang SPPN memuat tentang rencana pembangunan melalui penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Presiden atau Kepala Daerah waktu kampanyenya.

Perlunya sinergisitas, sinkronisasi, keselarasan, integrasi dan keterpaduan visi dan misinya kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan atau Daerah, yang mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan atau Daerah yang telah ditetapkan.

Ada 4 langkah besar sebagai basic perencanaan yang menjadi rujukan dan diterapkan oleh semua tahapan akan perencanaan disemua tataran pemerintahan yang ada, yaitu: (1) Merumuskan posisi organisasi yang tepat, jika sasaran telah ditetapkan, dimana pimpinan lebih memahami organisasi berada dimana saat ini dan untuk mencapai sasaran yang disepakati, sumber daya apa saja yang ada, (2) Menetapkan sasaran, yaitu kegiatan perencanaan dimulai dengan memutuskan apa yang ingin dicapai organisasi yaitu dengan menetapkan prioritas dan merinci sasaran secara jelas, dan organisasi dapat mengarahkan sumber daya agar lebih efektif, (3) Mengidentifikasi akan faktor faktor pendukung dan penghambat menuju sasaran, baik eksternal dan internal, yang diharapkan bisa memperkuat dan memperlambat sebuah organisasi dalam mencapai sasaran, (4) Dalam menyusun langkah langkah pencapaian akan sasaran, dengan mengayakan berbagai kemungkinan dan kebijakan alternatif akan langkah yang diputukan dalam mencapai sasaran, mencermati akan alternatif, dan memilih skala yang prioritas, cocok dan bisa memuaskan akan perencanaan yang disusun.

Pendekatan perencanaan pembangunan, bisa didasarkan pada ruang pendekatan dan koordinasi, berupa: (a) Perencanaan makro, (b) Perencanaan sectoral, (c) Perencanaan regional, (d) Perencanaan mikro. Prosesnya perencanaan pembangunan nasional disusun menggunakan pendekatan secara politik, teknokratik, atas bawah dan bawah atas dan partisipatif. Sementara itu berdasarkan substansinya pada perencanaan dan pembangunan nasional disusun menggunakan pendekatan THIS yaitu secara tematik, holistik, integratif, dan spasial. Hal ini ditujukan agar kebijakan pembangunan dituangkan secara komprehensif, terpadu, terintegrasi, baik lintas sektor, lintas K/L/D, maupun lintas wilayah pada dokumen perencanaan dan pembangunan. Proses penyusunan perencanaan pembangunan nasional menuntut adanya partisipasi dan kolaborasi dari instansi Pempus maupun Pemda serta non state actors (BUMN, swasta, filantropi, dan lembaga swadaya masyarakat) yang memiliki peranan dalam melaksanakan target capaian prioritas nasional.

Metode pengambilan keputusan dalam dokumen akan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan masa 1 tahun (RKPD) provinsi Kalimantan Barat bisa dilakukan dengan: (1) *Simple Multi Attribute Rating Technique* (SMART) dengan metode pengambilan keputusan yang menggunakan fungsi nilai yang dihitung secara matematis dan diketahui adanya skala penilaian yang telah dipahami oleh banyak orang, (2) Metode Dasar yang membeikan arah kepada metode pendekatan ini sangat simpel, dan membutuhkan perhitungan untuk mendukung analisis, (3) *Multi-Attribute Utility Theory* (MAUT), dengan menggunakan skala prioritas antara 0-1 untuk membantu dalam pembuatan keputusan di organisasi yang hasilnya dari prioritas itu dapat digunakan sebagai pembuat keputusan atau kebijakan, (4) NGT (*Nominal Group Technic*), adalah suatu metode untuk mencapai konsensus dalam suatu kelompok dalam membuat keputusan dengan berupa teknik yang mengumpulkan ide-ide dari tiap peserta atau anggota organisasi kemudian memberikan voting dan

rangking terhadap ide-ide yang dipilih dengan ide yang paling banyak skornya dan berarti merupakan konsensus secara kolektif, (5) *Basic Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA), umumnya mempunyai masalah yang memiliki salah satu dari sejumlah alternative yang didasarkan pada seberapa baik dalam penilaian hal yang dipilih.

Setelah melakukan pengambilan keputusan bisa mempertimbangkan dengan metode untuk menentukan skala prioritas, yaitu : (1) (Bimmaharyanto.s et al., 2017) Metode Hanlon, yang merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah dengan menggunakan empat kelompok kriteria, yaitu besarnya masalah (*magnitude*), kegawatan masalah (*emergency*), kemudahan penanggulangan masalah (*causability*), dan faktor yang menentukan dapat tidaknya program dilaksanakan, (2) Metode USG (*Urgent, Seriousness, and Growth*) dengan *Urgent*, tingkat kegawatan suatu masalah, artinya apabila masalah tidak segera ditanggulangi akan semakin gawat. *Seriousness*, tingkat keseriusan sebuah masalah, apabila masalah tidak diselesaikan akan berakibat serius pada masalah lainnya. *Growth*, besar atau luasnya masalah berdasarkan pertumbuhan atau perkembangan, artinya apabila masalah tersebut tidak segera diatasi pertumbuhannya akan berjalan terus, (3) Metode CARL (*Capability, Accessibility, Readiness, and Leverage*), pada metode CARL merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah jika data yang tersedia adalah data kualitatif. Pada metode ini dilakukan dengan menentukan skor atas criteria tertentu, seperti kemampuan (*capability*), kemudahan (*accessibility*), kesiapan (*readiness*), serta pengungkit (*leverage*), (4) Metode *Multi Criteria Utility Assesment* (MCUA) adalah metode kuantitatif untuk memilih intervensi terbaik di antara banyak pilihan kandidat yang berbeda.

Definisi pada pada Perencana (*Planners*), Rencana (*Plan*), dan Perencanaan (*Planning*) merujuk pada konsep dan proses yang terkait dengan perencanaan dalam berbagai konteks yang dapat menjadi alat yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan, baik itu dalam bisnis, pemerintahan, pembangunan kota, atau bidang lainnya. Kemudian dari sisi perbedaan terlihat bahwa perencana adalah aktor yang terlibat dalam perencanaan, sedangkan rencana adalah hasil konkret dari proses perencanaan. Perencanaan adalah keseluruhan proses yang melibatkan pemikiran, perumusan, dan proses distribusi rencana dalam mencapai tujuan yang telah disepakati. Jadi, perbedaan antara ketiganya terletak pada peran, output, dan proses yang masing-masingnya wakili dalam konteks perencanaan. Lebih lanjut tentang persamaannya dari ketiganya terletak pada fokus mereka untuk mencapai tujuan. Perencana bertujuan untuk merancang strategi, rencana bertujuan untuk memberikan panduan konkrit, dan perencanaan bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang memandu langkah-langkah menuju sukses. Maksud dan tujuan dari ketiganya selaras dalam upaya untuk mencapai hasil yang diinginkan melalui pendekatan yang terorganisir dan terstruktur.

Adanya inkonsistensi antara Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (RPJMN) dan Jangka Tahunan (RKPD) antara Pemerintah Pusat dan Pemda bisa timbul dari beberapa aspek. Perbedaan prioritas, fokus, atau alokasi sumber daya adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara perencanaan nasional dan daerah. Inkonsistensi terjadi karena perbedaan prioritas pembangunan, alokasi sumber daya yang berbeda, kondisi lokal yang tidak diperhitungkan, ketidakselarasan dalam pengembangan infrastruktur, ketidaksesuaian dalam program pembangunan spesifik, perbedaan pemahaman terhadap tujuan nasional. Penting untuk dicatat bahwa inkonsistensi ini tidak selalu bersifat negatif, seiring dengan otonomi daerah yang diberikan oleh Undang-Undang 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemda mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan dan program perencanaan dan pembangunan

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Namun, upaya koordinasi dan sinkronisasi antara Pempus dan Pemda tetap diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan nasional dan daerah berjalan sejalan untuk mencapai tujuan pembangunan secara holistik.

Perencanaan pembangunan nasional memiliki peranan yang vital dalam mencapai pembangunan secara berkelanjutan dan terarah. Selanjutnya (Hasibuan, 2021) menyampaikan betapa pentingnya perencanaan yaitu: (1) Tanpa perencanaan berarti tidak ada tujuan yang ingin dicapai, (2) Tanpa perencanaan tidak ada pedoman pelaksanaan sehingga banyak pemborosan, (3) Perencanaan ialah dasar pengendalian, lantaran tanpa ada planning pengendalian tidak sanggup dilakukan, (4) Tanpa perencanaan, tidak ada keputusan dan proses manajemen, (5) Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang terpenting dan saling terkait satu sama lain. Tanpa adanya perencanaan berarti tidak ada tujuan yang dicapai. Perencanaan ialah pedoman atau dasar pengendalian pelaksanaan manajemen, biar sanggup berjalan dengan relevan.

Langkah-langkah yang perlu dijalankan dengan cermat dan melibatkan berbagai pihak dalam perencanaan pembangunan provinsi bisa berjalan secara efektif, berkelanjutan, dan cocok dengan kebutuhan warga, yaitu : (1) Analisis situasi dan evaluasi kondisi saat ini, melakukan analisis menyeluruh terhadap kondisi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan di provinsi tersebut, (2) Penetapan visi, misi dan prioritas perencanaan pembangunan, dengan menetapkan visi jangka panjang, menengah dan tahunan dan misi pembangunan daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota, (3) Pengembangan rencana pembangunan jangka panjang, yaitu dengan merumuskan RPJP dan RJPD yang berisi tentang misi, visi, tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi berupa program, kegiatan dan proyek-proyek prioritas dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, (4) Penyusunan RPJMN itu yang bisa menyelaraskan dengan RPJPD dimana RPJMN dapat memuat langkah-langkah lebih spesifik untuk mencapai tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan dan menyesuaikan dengan kondisi terkini yang terjadi, (5) Pengintegrasian RKPD yang beisikan rencana pembangunan selama 1 tahun berjalan, (6) Partisipasi publik dan kolaborasi dengan stakeholder, (7) Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi, (8) Penganggaran dan alokasi sumber daya, mengembangkan sistem penganggaran yang sesuai dengan prioritas pembangunan, (9) Kerjasama dan koordinasi antar sektor dan antar instansi, yaitu dengan mendorong kerjasama dan koordinasi antara sektor-sektor dan instansi, bidang terkait di level provinsi maupun tingkat pemerintah pusat, (10) Penyesuaian dan evaluasi berkala dengan penyesuaian untuk mengakomodasi perubahan kondisi eksternal dan internal yang dapat memengaruhi pelaksanaan rencana pembangunan.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menurut UU 25/2004 itu memuat dengan lima pendekatan dalam menyusun perencanaan yang komprehensif, yaitu : (a) Politik, (b) Teknokratik, (c) Partisipatif, (d) Atas-bawah (*top-down*), dan (e) Bawah-atas (*bottom-up*). Evaluasi perencanaan bisa dilaksanakan dengan berdasarkan indikator, target, sasaran kinerja yang termuat melalui dokumen perencanaan pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja itu mencakup masukan (input), hasil (result), keluaran (output), dampak (impact) dan manfaat (benefit). Untuk kualitas hasil perencanaan, ada beberapa komponen penilaian terhadap perencanaan oleh Pemerintah Daerah yaitu: (1) Sinergi dengan mengukur kerjasama yang selaras dengan pemerintah pusat dan Pemda untuk mencapai sasaran prioritas Nasional/Daerah berupa a) Keselarasan kondisi ekonomi makro Daerah, b) Keselarasan sasaran utama pembangunan Daerah dengan sasaran utama pembangunan Nasional (kemiskinan, ketahanan pangan, tingkat pengangguran), c) Keselarasan RKPD Provinsi dengan RKP. Aspek Sinergi juga digunakan untuk menghitung dukungan sasaran/Program Daerah yang dianggarkan dalam APBD, (2) Kualitas dokumen

perencanaan a) Kesesuaian Prioritas Daerah dengan Isu/Kebutuhan Daerah, b) Kesesuaian Target dan Sasaran dalam mencapai Prioritas Daerah, c) Kesesuaian Proyek dalam mencapai Target dan Sasaran Pembangunan, d) Inovasi yang dihasilkan dalam perencanaan pembangunan, dan (3) Keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja, yang telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan lemahnya perencanaan pembangunan tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh perencana dapat mengakibatkan inkonsistensi, ketidak selarasan dan ketidak sinkronnya perencanaan periode jangka panjang, jangka menengah dan 1 tahun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Kemampuan SDM dalam melaksanakan perencanaan, kebijaksanaan, tujuan organisasi, kegiatan dan program yang tidak selaras dengan RPJMD. Terdapat misi, visi dan prioritas kepala daerah yang belum selaras, sehingga proses inputting data acapkali berulang-ulang dan tidak sinkron serta kurangnya koordinasi dan kerjasama antar Dinas terutama para pihak yang terlibat.

Kesenjangan penelitian (*research gap*) terdahulu menunjukkan belum ada indikator kinerja utama dan penilaian perencanaan dan definisi dan hubungan antara perencanaan dan pembangunan (Sudiro, 2011). Peran dari pemerintah dalam bentuk dana, pengadaan fasilitas, dan peraturan dalam kaitannya dengan pengembangan perencanaan (Saputra et al., 2024).

Pembangunan ekonomi dalam mendapatkan kesejahteraan, keadilan, dan perdamaian, yang arahnya perencanaan ekonomi dengan pembangunan belum disentuh (Widodo et al., 2015). Pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pembangunan melalui infrastruktur belum terukur melalui kajian dan atau harusnya ada dokumen khusus untuk menilai seperti executive summary project didalamnya ada infor memo dan cascading (Kurniawati, 2018). Strategi perencanaan yang telah diatur dan ditetapkan menjadi bagian utuh dalam penganggaran dan terjadinya pembangunan yang berkomprehensif dengan melibatkan sector swasta. Melalui aturan keterbukaan informasi publik, sistem yang efektif dan akuntabel dengan memaksimalkan teknologi AI sehingga bisa menambah kepercayaan public (Iazzolino & Stremlau, 2024). Berfokus pada system intelegen partisipatif dan adanya nilai perencanaan dalam hubungan keahlian dan politik belum terukur secara utuh sehingga pembuatan perencanaan menjadi lebih komplek. Begitu juga dengan keterhubungan, yang relasional, intersubjektif dan berorientasi pada pembelajaran semata (De Leo & Forester, 2017). Terdapat analisis empiris model tahapan e-Government dengan hasil pelaksanaan pembangunan di Hindia Belanda dan berfokus pada aplikasi e Government dan cenderung statis karena lamanya merespon dinamika politik kekinian (Rooks et al., 2017). Perencanaan pembangunan daerah diperlukan kajian dan regulasi. Penekanan pada perencanaan tata ruang daerah dengan acuan dari PDB, penduduk dan penataan lahan permukiman (Getzner & Kadi, 2020).

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada kemampuan SDM yang merupakan pelaksanaan sistem Perencanaan Pembangunan di daerah dengan lima pendekatan dalam menyusun perencanaan yang komprehensif berupa politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (*top-down*), dan bawah-atas (*bottom-up*). Pentingnya evaluasi perencanaan bisa dilaksanakan dengan berdasarkan indikator, target, sasaran kinerja yang termuat melalui dokumen perencanaan pembangunan. Sasaran dan indikator kinerja itu mencakup masukan (*input*), hasil (*result*), keluaran (*output*), dampak (*impact*) dan manfaat (*benefit*). Adanya road map reformasi birokrasi mengamanahkan untuk melaksanakan penilaian kualitas perencanaan melalui pengukuran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN). Penelitian ini memfokuskan pada perencanaan yang rendah oleh kalangan perencana, yang dapat mengakibatkan inkonsistensi, ketidak selarasan dan

ketidak sinkronnya perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan oleh Pemda Kalimantan Barat. Arah penelitian yang ingin dicapai yaitu mendapatkan penyebab inkonsistensi, ketidak selarasan dan ketidak sinkronnya perencanaan pembangunan tahun 2023 dengan indeks kinerja utama di Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan penelitian (*research objective*) ini bertujuan untuk mengetahui literasi perencanaan, mendiskripsikan tingkat pemahaman dan pengetahuan perencana tentang konsep perencanaan melalui dokumen RJPd, RPJMD dan RKPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi tingkat literasi perencana, seperti latar belakang pendidikan, pengalaman perencanaan, dan dari sosial-ekonomi lainnya dan menganalisis dampak terhadap perilaku perencanaan. Mengambarkan terjadi inkonsistensi pada dokumen perencanaan periode jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta uraian alasan-alasan pentingnya perencanaan pembangunan yang mempengaruhi perilaku perencanaan pembangunan, termasuk pengeluaran, penghematan, investasi, dan pengambilan keputusan perencanaan. Mendiskripsikan hasil dokumen IPPN provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 berupa penilaian dan rekomendasi perencanaan daerah sehingga bisa masuk dalam indeks kinerja utama lembaga sehingga berpengaruh pada tunjangan kinerja perencana.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Barat Gedung Pelayanan Terpadu Lantai 3, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat di jalan Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan untuk memudahkan akses ke data dan informasi, kebutuhan untuk bekerja sama dengan pihak terkait, mendapatkan perspektif dari pihak perencanaan, kelengkapan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung penelitian, ketersediaan informan dan responden, kerjasama dengan pemerintah daerah yang dapat menjadi mitra strategis, data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian ini bisa berasal dari sumber yang valid dan akurat serta telah mendapatkan surat tugas.

Proses penelitian berjalan selama 6 bulan yaitu dimulai awal Januari 2024 sampai dengan Juni 2024. Rentang waktu ini dianggap cukup untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan melakukan analisis yang mendalam, serta memastikan bahwa semua aspek penelitian dapat dijalankan dengan baik.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami konteks yang lebih dalam dari fenomena yang diteliti, mendorong interpretasi dan analisis mendalam terhadap data dengan menjelajahi makna di balik perilaku, pandangan, dan pengalaman individu. Mendukung pengembangan teori yang baru dan bisa menambah pengayaan akan teori yang timbul dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan terbuka dan mengeksplorasi area yang belum banyak diketahui dan dalam prosedur, kebijakan, dan konteks perencanaan pembangunan daerah. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 yang telah berjalan. Data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder yang kemudian diolah untuk memberikan analisis yang akurat. Data Primer ini dikumpulkan langsung dari responden melalui survei dan observasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi analisis perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan Data Sekunder dikumpulkan melalui sumber tidak langsung, seperti literatur, data perencanaan, aplikasi dan artikel terkait yang memberikan wawasan tambahan mengenai topik yang diteliti.

Dalam konteks penelitian ini terdapat 3 orang informan sebagai nara sumber dengan kriteria yang telah ditetapkan pada kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Barat yaitu : staff bidang perencanaan pengendalian evaluasi pembangunan daerah (PPEPD), staff bidang perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya alam dan staff bidang perencanaan sosial budaya (Purwoko Et Al., 2023). Adapun prosedur pengumpulan data kualitatif yaitu dengan observasi, wawancara mendalam, diskusi kelompok focus (FGD), berita media, dokumen (pemeriksaan arsip, analisis dokumen, survei kualitatif), validasi data, triangulasi, member checking, dan peer debriefing.

Teknik pengumpulan data dengan teknik observasi, yaitu peneliti melakukan observasi langsung terhadap aktivitas perencanaan dan lingkungan kerja untuk memahami konteks perencanaan pembangunan. Kemudian dengan teknik wawancara mendalam yang dilakukan kepada informan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang perencanaan pembangunan daerah provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 terhadap pertanyaan terbuka, dengan kategori jawaban yang lebih dalam tentang fenomena, kejadian, isu, masalah, tantangan dan harapan perbaikan. teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan informasi sekunder dari sumber-sumber terkait, termasuk laporan keuangan, struktur organisasi, dan kebijakan lembaga yang relevan untuk analisis. (Firdaus et al., 2022) Langkah-langkah analisis pada penelitian kualitatif yaitu persiapan data, transkripsi wawancara, pengelompokan data (*coding*), dan analisis content dan thema.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden terlihat kepehamannya yang cukup baik tentang :

Kriteria Perencanaan, Baiknya Perencanaan Pembangunan Dan Proses Perencanaan Di Kalimantan Barat

No	Nama Responden	Kriteria Perencanaan Pembangunan Yang Baik	Baiknya Perencanaan Pembangunan di Kalimantan Barat	Proses Perencanaan Pembangunan di Kalimantan Barat
1	HA	Perencanaan pembangunan yang baik harus mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan keberlanjutan, kesejahteraan, dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, seperti Keseimbangan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif. Perlunya juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi mereka diakomodasi yang dapat meningkatkan relevansi dan keberhasilan proyek pembangunan.	Secara resmi, perencanaan pembangunan di Kalimantan Barat ini sudah baik menyesuaikan regulasi yang ada seperti UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan UU 23/2014 tentang Pemda dan regulasi yang lainnya. Namun, kami juga melakukan pembinaan kepada perencanaan di 14 kabupaten /kota	Proses perencanaan pembangunan di Kalimantan Barat, seperti di Daerah lain di Indonesia, mengikuti kerangka dan pedoman yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Pemda Kalimantan Barat telah menyusun RPJPD yang mencakup visi, misi, dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 tahun dan RPJPD ini harus selaras dengan RPJPN. Berdasarkan RPJPD, disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode 5 tahun, yang sesuai dengan masa jabatan kepala Daerah. RPJMD ini berisi program-program strategis dan prioritas perencanaan yang akan dikerjakan selama 5 tahun. Musrenbang dilakukan di desa, kecamatan, kabupaten/kota, hingga

		Kemudian juga perencanaan wajib mengacu dengan data yang ada dan analisis kajian yang dalam dan terintegrasi dan berkoordinasi dengan berbagai stakeholders dan tingkatan pemerintahan.	provinsi Kalbar dan dengan keterbatasan sumber daya yang ada sehingga saya yakin perencanaan sudah maksimal.	provinsi. Proses ini melibatkan elemen pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan. Hasil Musrenbang menjadi rujukan dalam membuat dokumen RKPD yang dilaksanakan setiap tahun sebagai rencana kerja tahunan yang merinci program dan kegiatan prioritas beserta anggarannya. RKPD harus selaras dengan RPJMD dan hasil Musrenbang. Program dan kegiatan yang telah disusun dalam RKPD kemudian diusulkan dalam APBD. Proses ini melibatkan pembahasan antara eksekutif dan legislatif di tingkat provinsi. Setelah APBD disahkan, maka prioritas, kegiatan dan program akan dilaksanakan oleh OPD terkait. Pelaksanaan proyek-proyek ini diawasi dan dimonitor untuk memastikan kesesuaian dengan rencana yang telah disusun.
2	AR	Perencanaan pembangunan yang baik harus SMART artinya terukur, masuk akal, punya tujuan dan jelas yang mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan keberlanjutan, kesejahteraan, dan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu dilakukan agar kebutuhan dan aspirasi mereka diakomodasi yang dapat meningkatkan relevansi dan keberhasilan proyek pembangunan.	Iya dong, perencanaan pembangunan di Kalimantan Barat ini sudah baik dan sesuai dengan UU Sistem Perencanaan Nasional dan UU Pemda dan regulasi yang lainnya. Mohon maaf pak, saya sudah ada tamu dari DPRD Kabupaten Melawi dan mewakili Bappeda untuk diskusi perencanaan di Kalbar. Jadi sementara wawancaranya cukup sampai disini dulu dan nanti diatur lagi sambungannya. Terimakasih	Proses perencanaan pembangunan di Kalimantan Barat mengikuti kerangka dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, seperti menyusun RPJPD dengan jangka waktu 20 tahun yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Kemudian dari RPJPD, disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 tahun, yang sesuai dengan jabatan Gubernur Kalbar yang berisi program-program strategis dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan. Melalui Musrenbang dari tingkat RT, Dusun, Desa/Kelurahan, trus Kecamatan dan Kabupaten/Kota yang merupakan bahan penting dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun sebagai rencana kerja tahunan yang mentabulasikan kegiatan dan program prioritas beserta anggarannya. Melalui RKPD yang diusulkan kemudian menjadi APBD bersama eksekutif dan legislatif
3	MY	Iya bg, menurut saya itu perencanaan pembangunan itu harus mempertimbangkan	Jelas bang, kan bisa dilihat dokumen perencanaan yang	Perencanaan pembangunan Kalbar mengikuti kerangka dan pedoman yang ditetapkan. Pemprov Kalbar menyusun

	keberlanjutan, kesejahteraan, dan manfaat bagi masyarakat. Perencanaan harus didasarkan dengan data yang akurat dan terintegrasi dan berkoordinasi dengan berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan. Sangat penting juga melibatkan masyarakat dalam perencanaan agar kebutuhan dan aspirasi mereka diakomodasi yang dapat meningkatkan keberhasilan proyek.	disusun seperti RPJMD, RKPD, KLHS/TPB dan dokumen perencanaan yang bisa dilihat oleh publik.	RPJPD dengan pendekatan teknokratik yang mencakup arah pembangunan jangka waktu 20 tahun yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Penyusunan RPJMD yang 5 tahun harus selaras dengan RPJPD. RPJMD harus menyesuaikan dengan masa jabatan Gubernur dengan program-program strategis dan prioritas yang akan dilaksanakan selama 5 tahun. Penyusunan RKPD yang disusun setiap tahun sebagai rencana kerja tahunan yang merinci program dan kegiatan prioritas beserta anggarannya yang selaras dengan RPJMD dan menyesuaikan hasil Musrenbang tahunan.
--	---	--	--

Sumber : Data Olahan Dari Pedoman Wawancara No.1-3, Juli 2024

(Pedoman Wawancara No.1-3) yang sesuai dengan regulasi yang ada seperti UU 25/2004 tentang SPPN dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Responden cukup memahami dan menjelaskan tentang istilah perencanaan, definisi pembangunan, dan hubungan antara perencanaan & pembangunan di Kalimantan Barat sangat erat dan saling terkait. Pemda Kalimantan Barat telah membuat rencana strategis yang mencakup tujuan jangka panjang, visi dan misi. Didalamnya juga mencakup RKPD, RPJMD dan RPJPD dengan mengedepankan prioritas pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, yang sangat penting untuk kemajuan Daerah. Kemudian responden cukup memahami dan menjelaskan dengan baik tentang dokumen RKPD tahun 2023, dokumen Renstra organisasi perangkat Daerah (OPD) selama 5 tahun yaitu 2018-2023 Kalimantan Barat, dan dokumen Renja OPD tahun 2023 yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.

Responden tidak cukup memahami dan menjelaskan dengan baik tentang Permen PAN-RB tentang pelaksanaan penilaian kualitas perencanaan berupa IPPN yang menjadi salah satu hasil & output yang diharapkan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi pada K/L/D. Dengan mengukur kualitas perencanaan, aspek sinergi digunakan untuk menghitung dukungan sasaran/program Daerah yang dianggarkan dalam APBD, kualitas dan mutu dokumen perencanaan, yang dilakukan oleh Pemda sehingga bisa mengurangi terjadinya inkonsistensi dokumen perencanaan jangka 20 tahun, jangka 5 tahun dan jangka 1 tahun di Provinsi Kalimantan Barat.

Responden cukup memahami dan menjelaskan dengan baik tentang upaya proses perencanaan masuk dalam indeks kinerja utama lembaga sehingga berpengaruh pada tunjangan kinerja perencana tahun 2023 di provinsi Kalbar. Pemberdayaan dengan meningkatkan keterlibatan warga dalam perencanaan daerah terlihat jawaban yang sangat baik dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menyediakan akses cepat dan mudah ke pusat informasi dan adopsi inovasi dalam praktik perencanaan Daerah, atau ketersediaan platform digital untuk meningkatkan literasi perencana Daerah (Kurniawan et al., 2020).

Implikasinya yaitu perencana yang kompeten dan berpengetahuan akan lebih mampu menghadapi tantangan dan menciptakan solusi inovatif dalam mewujudkan pembangunan yang

inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Barat, mendorong kolaborasi antara tim perencana dan para stake holder lainnya, pentingnya evaluasi akan lebih efektif dalam memantau implementasi rencana dan melakukan perbaikan yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi terutama dinamika proses perencanaan memungkinkan penyesuaian yang cepat dan efektif terhadap perubahan kondisi dan tantangan yang dihadapi. Inkonsistensi antara dokumen RKPD, RPJMD, dan RPJP dapat membawa berbagai implikasi negatif yang berdampak pada efektivitas pembangunan di Kalimantan Barat, berupa kehilangan arah dan fokus pembangunan, pemborosan sumber daya, pelaksanaan program yang bias terganggu karena Inkonsistensi dapat menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan program karena perlu adanya penyesuaian terus-menerus, membuat evaluasi kinerja menjadi sulit karena tidak ada standar yang jelas untuk mengukur keberhasilan dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga perencana.

Memasukkan upaya proses perencanaan ke dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) lembaga dan menghubungkannya dengan tunjangan kinerja perencana dapat memiliki beberapa implikasi penting, baik positif maupun negatif. (1) Implikasi positif berupa peningkatan kualitas perencanaan, yang mempengaruhi tunjangan yang mereka terima, akuntabilitas dan transparansi akan lebih bertanggung jawab, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, terjadinya peningkatan kapasitas perencana akan lebih terbuka dan berinovasi dalam mencari solusi dan pendekatan baru dalam proses perencanaan. (2) Implikasi negatif berupa stres dan tekanan kerja dengan mengaitkan kinerja dengan tunjangan dapat menambah tekanan dan stres bagi perencana, yang bisa berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan mereka. Kecenderungan manipulasi data dengan adanya risiko bahwa perencana mungkin tergoda untuk memanipulasi data atau laporan kinerja untuk memastikan mereka mencapai target yang diperlukan untuk mendapatkan tunjangan. Konflik internal karena persaingan tidak sehat di antara perencana atau tim perencanaan yang bisa mengurangi kerjasama dan kolaborasi yang penting dalam proses perencanaan yang holistik. Ketergantungan pada indikator dengan pendekatan semata-mata Berdasarkan Indikator oleh perencana mungkin hanya fokus pada memenuhi indikator tertentu tanpa memperhatikan aspek-aspek lain dan cuma fokus pada target jangka pendek bisa mengorbankan perencanaan jangka panjang yang lebih strategis.

Temuan penelitian/pertanyaan penelitian dan pengungkapan fakta lain yang tidak atau belum terungkap oleh pihak lain dengan penelitian analisis perencanaan pembangunan daerah pemerintah provinsi Kalimantan Barat tahun 2023, yaitu : (a) Perencanaan pembangunan yang disusun, harusnya mengidentifikasi sejumlah tantangan dengan keterbatasan sumber daya sehingga banyak perencanaan yang belum maksimal, seperti : keberlanjutan lingkungan dengan deforestasi dan degradasi lahan yang konversi hutan dan lahan perkebunan kelapa sawit dan tambang telah mengancam ekosistem dan keanekaragaman Hayati, penanganan bencana alam seperti masalah banjir dan kebakaran hutan yang masih sering terjadi. Pemerataan pembangunan dengan menghitung secara detail tentang kesenjangan wilayah dengan mengurangi perbedaan signifikan dalam tingkat pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan sehingga terdapat kekurangan infrastruktur dasar atau sarana prasarana seperti listrik, jalan, dan air bersih, dll. Kesejahteraan sosial dengan mengurangi tingkat kemiskinan walaupun masih adanya masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan di daerah pedesaan seperti akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Partisipasi publik dan tata kelola yang harus transparansi dan akuntabilitas anatara masalah dalam transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pembangunan dengan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Ekonomi dan diversifikasi dengan ketergantungan pada sektor primer yang ekonomi yang masih bergantung

pada sektor primer seperti perkebunan dan tambang, tanpa diversifikasi yang memadai dan disertai dengan pengembangan industri dan manufaktur dengan kawasan industri daerah kabupaten Ketapang dan kabupaten Landak.

Proses perencanaan pembangunan di Kalimantan Barat harus mengikuti UU 25/ 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional, namun untuk regulasi turunan yang lain seperti Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. IPPN bisa mengukur kualitas perencanaan, aspek sinergi digunakan untuk menghitung dukungan sasaran/program Daerah yang dianggarkan dalam APBD, kualitas dokumen perencanaan. Bappeda Provinsi Kalimantan Barat lebih aktif, kreatif dan inovatif terhadap IPPN ini dengan terus belajar dan mengsosialisasikannya kepada pegawainya. Pentingnya IPPN adalah untuk memastikan bahwa semua rencana pembangunan yang dibuat oleh kementerian dan lembaga dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, serta selaras dengan visi pembangunan Nasional tahun 20245 menuju Indonesia sebagai negara maju.

Hasil studi empiris dari penelitian tentang perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan kerangka regulasi nasional, seperti UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Temuan ini mencakup pemahaman responden yang baik mengenai dokumen strategis seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta proses Musrenbang yang menjadi inti dari partisipasi publik dalam perencanaan. Meski demikian, terdapat tantangan signifikan, seperti inkonsistensi dokumen perencanaan, keterbatasan sumber daya, dan dinamika politik yang dapat menghambat implementasi rencana. Responden juga memahami pentingnya IPPN (Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional) sebagai alat evaluasi kualitas perencanaan daerah. Selain itu, penelitian menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, penggunaan teknologi informasi, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan efektivitas perencanaan.

Perbandingan dengan studi terdahulu, hasil penelitian ini menunjukkan beberapa kemiripan dan perbedaan. Studi sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh (Kurniawan et al., 2020), menekankan pentingnya inovasi dan teknologi dalam perencanaan, yang juga terlihat dalam rekomendasi penelitian ini terkait penggunaan sistem informasi geografis (SIG) dan e-government. Namun, penelitian terdahulu lebih banyak membahas tantangan teknis seperti kurangnya data terintegrasi, sementara studi ini menambahkan aspek praktis seperti pengaruh IPPN terhadap kinerja rencana. Selain itu, penelitian ini memperluas diskusi tentang dampak inkonsistensi dokumen terhadap kepercayaan masyarakat dan efisiensi pelaksanaan program, yang belum dibahas secara mendalam dalam studi sebelumnya. Implikasi kebijakan yang diberikan juga lebih holistik, mencakup penguatan kapasitas individu hingga strategi kolaborasi lintas sektor. Hal ini menandakan bahwa studi ini tidak hanya memperkuat hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan pendekatan baru yang lebih komprehensif terhadap perencanaan pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan telah mencapai beberapa keberhasilan, seperti pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung aktivitas ekonomi. Sektor perkebunan kelapa sawit dan tambang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB provinsi. Responden memahami hubungan erat antara perencanaan dan pembangunan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RKPD, RPJMD, dan

RPJPD. Namun, inkonsistensi perencanaan sering muncul karena perbedaan prioritas kebijakan, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah, serta dinamika politik yang memengaruhi perubahan kebijakan. Upaya peningkatan kualitas perencanaan melibatkan pengintegrasian proses ke dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) lembaga, memotivasi perencana, serta memberikan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi mereka. Disarankan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, memanfaatkan teknologi informasi untuk konsistensi data, dan melibatkan pemangku kepentingan lintas sektor dalam penyusunan rencana kerja. Selain itu, analisis kebutuhan yang mendalam, transparansi informasi, dan pemanfaatan teknologi seperti SIG dan e-government dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Rekomendasi lain termasuk membentuk tim koordinasi lintas sektor, mengadakan kaji terap ke daerah lain, dan berkonsultasi dengan ahli perencanaan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat.

REFERENSI

- Bimmaharyanto.s, D. E., Fudholi, A., & Widodo, G. P. (2017). EVALUASI TINGKAT KESESUAIAN STANDAR AKREDITASI TERHADAP PELAYANAN FARMASI DAN STRATEGI PERBAIKAN DENGAN METODE HANLON DI RSUD KABUPATEN BIMA. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.58258/jime.v3i2.255>
- De Leo, D., & Forester, J. (2017). Reimagining planning: Moving from reflective practice to deliberative practice - a first exploration in the Italian context. *Planning Theory & Practice*, 18(2), 202–216. <https://doi.org/10.1080/14649357.2017.1284254>
- Firdaus, A., Saefullah, A., Noviar, E., & Asmana, Y. (2022). Pendidikan Dan Pelatihan yang Mempengaruhi Profesionalisme Guru: Studi Kualitatif Manajemen Sekolah. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Indonesia*, 1(3), 39–46.
- Getzner, M., & Kadi, J. (2020). Determinants of land consumption in Austria and the effects of spatial planning regulations. *European Planning Studies*, 28(6), 1095–1117. <https://doi.org/10.1080/09654313.2019.1604634>
- Hasibuan, R. (2021). *Perencanaan dan Evaluasi Kesehatan Masyarakat*. Penerbit NEM.
- Iazzolino, G., & Stremlau, N. (2024). AI for social good and the corporate capture of global development. *Information Technology for Development*, 30(4), 626–643. <https://doi.org/10.1080/02681102.2023.2299351>
- Kurniawan, A., Noor, M. A., Sutrisno, H., & Hakim, M. P. (2020). PENGARUH PEMASARAN MEDIA SOSIAL DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA TOKO TIGER WILD STORE. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen & Bisnis*, 1(2), 127–137.
- Kurniawati, S. (2018). Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. *Seminar Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2018 (SATIESP 2018)*, 127. https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2019/09/prosiding-satiesp-2018_compressed.pdf#page=135
- Purwoko, H., Saksana, J. C., & Soehaditama, J. P. (2023). Key Performance Indicator: Concept, Implementation to Performance Management. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, 2(8), 3261–3268.

- Rooks, G., Matzat, U., & Sadowski, B. (2017). An empirical test of stage models of e-government development: Evidence from Dutch municipalities. *The Information Society*, 33(4), 215–225. <https://doi.org/10.1080/01972243.2017.1318194>
- Saputra, H., Upe, R., Fadli, A., & Azzahra, S. A. (2024). Analisis manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Tangerang Kuat Sejahtera Kota Tangerang. *Jurnal Ekualisasi*, 5(1). <http://jurnal.stieganessa.ac.id/index.php/ekualisasi/article/view/6>
- Sudiro, A. (2011). *Perencanaan Sumberdaya Manusia*. Universitas Brawijaya Press.
- Wibowo, E. (2008). PERENCANAAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DI INDONESIA. *JURNAL EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN*, 8(1), Article 1. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Ekonomi/article/view/390>
- Widodo, E. S., Fahmi, R., & Pantaryanto, N. (2015). Tingkat Stres Petugas Pemandu Lalu Lintas Penerbangan. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 2(1), 64–81.